

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kualitas audit merupakan salah satu hal yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Kualitas hasil audit memiliki banyak dimensi sehingga belum ada pedoman tetap untuk mengukur kualitas hasil audit. Menurut DeAngelo (1981) dalam Lauw dan Elyzabeth (2012), kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan mengungkapkan pelanggaran tersebut dalam laporan audit.

Kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan mutu dari hasil pemeriksaan. Semakin banyak temuan maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan kualitas kerja auditor yang ditunjuk dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan oleh auditor dapat berkualitas yang memenuhi ketentuan dan standar auditing. Auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah harus memenuhi ketentuan atau standar auditing yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI), yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Agar Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara secara efektif, sesuai peraturan perundang-undangan yang mutakhir maka Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

tentang SPKN mengatur hal-hal pokok yang memberi landasan operasional sebagai pengganti Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang selama ini berlaku. SPKN memuat pernyataan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pemerintah di suatu negara dapat mengelola dana dalam jumlah yang cukup besar. Agar guna menjamin pendistribusian dana yang merata, pemerintah seharusnya mendukung penggunaan dana atas penyelenggaraan pemerintah dengan suatu pengawasan yang handal. Sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pengawasan adalah audit, yang terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang diterapkan, dan menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah, *et.al*, 2009). Audit juga merupakan suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (*assertion*) tentang kejadian dan kegiatan guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Indra, 2007).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Tetapi tidak mudah menjaga kompetensi dan

independensi auditor. Pengalaman kerja auditor juga bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, dapat memahami dan melaksanakan prosedur audit dengan benar, serta memahami dan menggunakan metode penyampelan dengan benar. Membentuk auditor yang kompeten dapat melalui pelatihan auditor, memperbanyak pengalaman auditor dengan mengikuti kegiatan audit, serta latar belakang pendidikan yang dimiliki auditor. Agar memiliki pengetahuan serta kemampuan yang profesional untuk melaksanakan audit, auditor dapat melakukan pelatihan secara berskala. Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Salsabila (2011) menjelaskan bahwa perbedaan pengetahuan antar auditor berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan masalah.

Pengalaman auditor merupakan faktor yang penting dalam menilai hasil kualitas audit. Semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin tinggi nilai hasil kinerja mereka. Khususnya auditor, dengan banyak pengalaman kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan dan kesalahan akan semakin tinggi. Kemampuan auditor dituntut lebih tinggi dari *auditee*. Latar belakang pendidikan auditor mencerminkan ilmu pengetahuan yang dimiliki auditor sebagai bekal untuk menjalankan tugas audit, semakin banyak bekal pengetahuan yang dibawa auditor maka semakin tinggi hasil kualitas pemeriksaan auditor. Auditor yang profesional akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas bagi para pengguna.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan objek penelitian BPK RI Perwakilan provinsi Jawa Timur sebagai pihak independen yang diberi wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah di Indonesia khususnya Provinsi

Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan sebagai satu-satunya institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Di tahun 2009, BPK mampu mengungkapkan kerugian negara sebesar 7,4 triliun pada kasus *Bank Century*. Kedudukan BPK menjadi sorotan karena peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Kemampuan auditor BPK saat menemukan dan mengungkapkan sebanyak mungkin kesalahan dan kecurangan yang dilakukan *auditee* adalah kunci keberhasilan BPK dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kewajiban auditor BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan guna memenuhi tujuan pemeriksaan yang merupakan tanggung jawab dalam pendahuluan SPKN.

Fenomena independensi auditor BPK RI yang terjadi di Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan tingginya tingkat korupsi. Pada tahun 2005 berita mengenai kasus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga melakukan tindakan usaha penyuapan terhadap auditor BPK RI. Berkaitan dengan kasus KPU, ketua BPK RI pada akhirnya mengganjar pemeriksa BPK RI dengan peringatan agar tidak lagi melakukan tindakan non-prosedural. Seharusnya auditor BPK RI tersebut memberikan laporan kepada auditor lain atau ketua tim audit. Auditor BPK RI dalam konteks kasus KPU telah melakukan tindakan tidak etis, sehingga dari sisi independensi dan obyektivitas, auditor BPK RI sangat pantas diragukan (<http://www.antikorupsi.org>). Tidak hanya itu adapun ditemukan fenomena khusus yang terjadi di BPK RI Provinsi Jawa

Barat. Kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terjadi di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad telah melakukan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuapan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk mendapatkan Adipura tersebut Wali Kota Bekasi menyuap auditor BPK sebesar Rp 200.000.000 untuk memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat (<http://korupsi.vivanews.com>).

Kasus selanjutnya auditor badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada tahun 2009 mendapatkan kasus yang menimpa auditor BPK Bagindo Quirino sebagai tersangka. Bagindo Quirino diindikasikan telah menerima suap dari mantan pejabat Depnakertrans Bahrudin Effendi sebesar Rp 650.000.000, uang itu diberikan untuk mengubah hasil temuan yang dilakukan auditor (<http://nasional.kompas.com>). Adapula kasus suap di tahun 2011, BPK RI Sulawesi Utara oleh Walikota Tomohon merupakan tindakan yang tidak etis sehingga membuat auditor BPK RI diragukan independensinya. Kasus ini berawal dari Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon. Auditor BPK diduga menerima uang senilai Rp 600.000.000 dari Walikota Tomohon. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Auditor BPK juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7.500.000 (<http://news.detik.com>).

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan variabel independensi, kompetensi, latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor

sebagai variabel independen. Dan variabel dependennya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari independensi, kompetensi, latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Judul penelitian ini adalah: **“Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara?
3. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara?
4. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tambahan terhadap pengembangan teori perilaku di dalam literatur akuntansi menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit Keuangan Negara.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengertian dan pemahaman bagi para auditor atau para praktisi akuntansi atau akuntan profesional tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit Keuangan Negara.
3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit seorang auditor Keuangan Negara khususnya di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika yang digunakan secara umum merujuk pada pedoman penulisan proposal STIE Perbanas Surabaya. Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang melandasi penelitian, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, Identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji regresi linear berganda, serta pembahasan yang mengarah pada perumusan masalah dan hipotesis penelitian.



## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab mengenai hipotesis penelitian. Keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

